

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI
DENGAN SEKJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Selasa, 9 Oktober 2012
Pukul	: 14.25 – 15.10 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat	: Nasir Djamil / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Endah Sri Lestari, SH / Kepala Bagian Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir	: 27 orang Anggota dari 51 Anggota Komisi III DPR-RI.
Ijin	: 12 orang anggota dari 51 Anggota Komisi III DPR-RI.
Acara	: Pembahasan Realokasi Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas ke Belanja Modal dalam RKA KL Tahun Anggaran 2013

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Hal-hal yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan usulan RAPBN tahun 2013 Rp.7.273.933.169.000,- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.365.195.308.000,- dan estimasi efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 37.872.483.000,- atau sebesar 10,37% dari total belanja perjalanan dinas. Hasil Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas tersebut direlokasi ke Belanja Modal dan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi gedung kantor pada satker/UPT yang bersangkutan.

2. Hal-hal yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- Pemotongan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar 10-15%, kecuali perjalanan dinas untuk pengawasan / pemeriksaan sebesar Rp.5-10%.
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas tersebut direlokasi ke Belanja Modal
- Efisiensi Belanja Perjalanan dinas tetap memperhatikan tercapainya target kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM khususnya Pengawasan dan Pemeriksaan.

Efisiensi Belanja Perjalanan dinas Tahun 2013 akan dilakukan dengan cara :

- Selektif dalam Pemberian Fasilitas Perjalanan Dinas, terutama Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Mengurangi Jumlah hari Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- Mengurangi Jumlah Orang Pelaksana Perjalanan Dinas

- Kegiatan-kegiatan : Rapat-rapat, Raker, Rakor, Seminar, Workshop, *Focus Group Discussion (FGD)*, Penyusunan Laporan, hanya akan di fasilitasi dengan uang saku dan /atau uang transpor sesuai ketentuan dalam Peraturan Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Umum (SBU)
- Komnas HAM telah mengintruksikan kepada Kepala / Plt Kepala Biro, Sesjen Komnas Perempuan dan para PPK agar menyusun kembali rincian anggaran belanja Perjalanan dinas setelah dipotong serta menyusun rincian belanja modal untuk biaya pengadaan Barang Modal (Asset) yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungannya.
- Komnas HAM telah berkoordinasi untuk melakukan penyusunan kebutuhan barang Modal sesuai kebutuhan unit-unit kerja di lingkungan Komnas HAM serta akan melaksanakan pengadaan Barang Modal tersebut pada tahun 2013 di bawah koordinasi Biro Umum.

Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Nasir Djamil / F.PKS :

- a. Setelah mendengar penjelasan mengenai pergeseran alokasi belanja perjalanan dinas ke belanja modal. Hendaknya memperhatikan mitra kerja yang memiliki kegiatan yang bersifat mobile dimana perjalanan dinas sangat dibutuhkan. Oleh karenanya Komisi III perlu memperhatikan masalah ini. Sehingga mitra kerja yang memiliki program kerja yang sifatnya mobile seperti pengawasan, pemeriksaan, ataupun kegiatan lainnya yang membutuhkan kehadiran mitra kerja di lokasi tertentu maka hendaknya anggaran perjalanan dinas diperjuangkan.
- b. Komnas HAM
 - Bagaimana kesiapan Komnas HAM dalam pemilihan komisioner.

2. M.Nurdin / F.PDI PERJUANGAN :

- a. Kemenkumham
 - Hendaknya Kemenkumham memperhatikan berbagai kebutuhan Lapas seperti keterampilan sdm di Lapas, peralatan (contoh : alat detektor, dsb) untuk mendeteksi selundupan ke dalam lapas (alat komunikasi, dsb)
 - Lapas di Indonesia, pengadaan barang agar dipilih kualitas yang baik, mudah dioperasikan dan mudah perawatan / pemeliharaan. Dari hasil kunker banyak ditemukan mesin tua buatan jerman atau mesin baru buatan cina yang mudah rusak.
- b. Komnas HAM
 - Komnas HAM hendaknya memilih dan memilah prioritas, karena banyak persoalan HAM baik yang didalam negeri maupun diluar negeri, sehingga anggaran untuk perjalanan dinas bisa di secara efisien dan efektif.
 - Terkait realokasi belanja perjalanan dinas ke belanja modal. Hendaknya pengawasan dilakukan sebaik-baiknya, agar spek yang didapat sesuai dengan yang diharapkan, karena pengadaan barang rawan dan hendaknya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3. Edi Sadeli / F. PD :

- a. Kemenkumham
 - Apakah ada Hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Mohon Dijelaskan.
 - Anggaran untuk lembaga bantuan hukum sebesar Rp.63 milyar. Berapa jumlah Lembaga bantuan hukum diseluruh Indonesia, meminta penjelasan terkait daftar lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia.
 - Meminta penjelasan terkait operasional untuk 19 satuan kerja yang baru, mohon dijelaskan list satuan kerja tersebut.
- b. Komnas HAM
 - Penjelasan terkait anggaran untuk Komnas Perempuan.
 - Penjelasan terkait upaya mendapatkan Gedung di Hayam wuruk dan rencana Komnas HAM pindah gedung.
 - Jika Komnas HAM jadi pindah ke Hayam Wuruk, apakah Komnas Perempuan akan ikut serta.

4. Bahrudin Nashori / F. PKB

- a. Kemenkumham
 - Usulan Tambahan Rp.129 milyar.
 - Harus dibuat prioritas untuk tambahan anggaran, misalnya pembangunan gedung yang akan terhenti karena tidak ada anggaran, atau renovasi terhadap bagian gedung yang rusak yang tidak bisa dilakukan karena tidak tersedia anggarannya.
- b. Komnas HAM
 - Efisiensi cukup banyak.
 - Komnas HAM pernah mengajukan Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung. Sehingga Komisi III perlu antisipasi seandainya anggota Komnas HAM yang terpilih nanti berjumlah 15 tentunya memerlukan tambahan ruangan. Nantinya Komnas HAM akan mengajukan kembali di APBN-P tahun 2013.
 - Kebijakan pemerintah terkait pemotongan perjalanan dinas digeser ke belanja modal adalah berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK RI. Namun jika Komnas HAM dan Komnas Perempuan sangat membutuhkan anggaran perjalanan dinas maka Komisi III akan mendukung usulan agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak dikenakan realokasi efisiensi perjalanan dinas ke belanja modal.

5. Nasir Djamil / F. PKS :

- a. Kemenkumham
 - Adanya lembaga bantuan hukum yang mendapat akreditasi dari Kemenkumham yang selanjutnya bekerjasama dalam pelayanan masyarakat memberi bantuan hukum.
- b. Komnas HAM
 - Hasil Fit n proper test calon anggota Komnas HAM terkait jumlah komisioner terpilih dan keterbatasan ruangan di gedung kantor Komnas HAM.

Penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Semua masukan ditampung dan akan ditindaklanjuti .
2. Hal yang menjadi prioritas dalam pengadaan barang akan mendapatkan perhatian kemenkumham.
3. Percetakan LP Sukamiskin akan diupayakan jaya seperti dahulu.
4. Terkait pembangunan Lapas diharapkan tercapai sesuai dengan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, memohon dukungan Komisi III.
5. Layanan Bantuan Hukum ada 360 LBH
6. 40 satker baru yang telah disetujui Menpan.
7. Mekanisme Hibah komunikasi dengan seluruh jajaran militama, diakhir tahun seluruh keterkaitan dengan hibah akan dilaporkan ke kementerian keuangan.
8. Jawaban secara lengkap akan disampaikan secara tertulis.

Penjelasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Apresiasi terhadap saran, masukan dan kritikan komisi III
2. Saran akan diterima dan diperhatikan. Seperti belanja modal.
3. Untuk pengadaan akan dilaksanakan sebaik-baiknya dan se-transparan mungkin.
4. Didalam Anggaran Komnas HAM sudah termasuk anggaran untuk Komnas Perempuan. Alokasi anggaran untuk Komnas Perempuan di tahun 2013 sebesar Rp.10,6 milyar.
5. Terkait Hibah, ditahun 2013 Komnas HAM belum ada hibah, sedangkan Komnas Perempuan sudah ada Hibah tahun 2013.
6. Klarifikasi, bahwa Komnas HAM pernah mengajukan tambahan anggaran pada APBN-P TA 2013 untuk pengadaan gedung Rp.150 milyar.
7. Terkait pemilihan Komisioner, jumlah yang sesuai adalah 11 orang, jika jumlah terlalu banyak maka tidak tertampung di gedung kantor yang saat ini ditempati, kecuali jika sudah pindah ke hayam wuruk.
8. Komnas HAM pernah mengajukan Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung sebagai antisipasi seandainya anggota Komnas HAM yang terpilih nanti berjumlah lebih banyak tentunya memerlukan tambahan ruangan. Nantinya Komnas HAM akan mengajukan kembali di APBN-P tahun 2013.
9. Komnas Perempuan

- Komnas HAM dan Komnas Perempuan merupakan 2 lembaga yang berbeda yang berada dalam satu satker, masing-masing punya kedaulatan sendiri-sendiri.
- Jika kantor Komnas HAM pindah ke hayam wuruk maka komnas Perempuan tidak akan ikut pindah karena kantor, kepengurusan dan pendirian masing-masing.
- Komnas Perempuan memohon agar tidak dikenakan pemotongan perjalanan dinas, karena dalam pelaksanaan tugas Komnas Perempuan banyak melakukan perjalanan dinas ke daerah / wilayah yang memerlukan perhatian khusus dari Komnas Perempuan, antara lain di wilayah dimana terjadinya pelanggaran HAM dan mengharuskan peninjauan lapangan.
- Bagi Komnas Perempuan ketika belanja perjalanan dinas harus direalokasikan ke belanja modal terasa agak memberatkan. Komnas Perempuan terdorong untuk berpikir kebutuhan belanja modal yang bermanfaat untuk masa mendatang.
- Komnas Perempuan memohon perhatian dan dukungan anggaran diperbesar, saat ini hanya 40% yang disupport dari APBN sedangkan 60% di support dari pendonor. Sehingga membuat Komnas Perempuan tidak mempunyai pilihan lain selain menerima donor tersebut karena untuk mencukupi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.
- Baik Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendapat anggaran relatif kecil, sehingga sering terhambat dalam partisipasi HAM Internasional.

III. PENUTUP

Setelah mendengar penjelasan dari Sekjen Kementerian Hukum dan HAM dan Ketua Komnas HAM, serta masukan pandangan dan pemikiran para Anggota Komisi III, Komisi III DPR RI memahami dan menerima penjelasan terhadap pemotongan perjalanan dinas dialokasikan kepada belanja modal. Rapat Dengar Pendapat tidak mengambil keputusan, semua penjelasan dan masukan akan dibahas dalam rapat komisi, dan hasilnya akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI untuk diproses sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan

Rapat ditutup tepat pukul 15.20 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

NASIR DJAMIL